

**PEMBELAJARAN PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURSIWI
KOTA YOGYAKARTA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Magister Manajemen Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Guna Memperoleh Gelar Magister Manajemen Pendidikan**



Disusun oleh :

A.A. Sujadi

Q. 100070083

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang terpadu, merata, seimbang dengan basis mutu lokal, regional dan internasional. Tujuannya tidak lain guna meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan *pengejawantahan* dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan dan peserta didik.

Salah satu tuntutan reformasi yang utama adalah demokratisasi yang mengarah pada dua hal yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat akan dikurangi dan sebaliknya memperbesar peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Sistem desentralisasi diharapkan mampu mengefisienkan dan mengefektifkan sistem pendidikan nasional yang dicanangkan sehingga *cost* belajar menjadi lebih terjangkau, merata, setara dan bermutu. Ini merupakan paradigma baru Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan menggantikan paradigma Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang lama yang sentralistis dan boros.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Ini artinya, pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan (peserta didik dan pendidik) menjunjung semangat kebersamaan, kebhinekaan dan tanggungjawab. Pendidik harus mampu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat 1).

Konsekuensinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun (Pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat (Pasal 34 ayat 2).

Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat (Pasal 46 ayat 1). Bahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 46 ayat 2). Itulah sebabnya dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pendidikan.

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (Pasal 50 ayat 1) yaitu

menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (Pasal 50 ayat 2). Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan menyediakan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidikan dengan harapan mempercepat pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini pewilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang juga memperhatikan muatan lokal, melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian penyediaan tenaga kerja dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis.

Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional (Pasal 50 ayat 3). Hal ini dimaksudkan selain mengembangkan

keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (Pasal 42 ayat 2). Dalam hal ini termasuk memfasilitasi dan atau menyediakan pendidik dan atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan atau guru untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (Pasal 41 ayat 1 dan 2).

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Penyelenggaraan pendidikan berprinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keagamaan, kultural dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik, terbuka dan bermakna. Pendidikan diselenggarakan

sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Jika UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tentunya hal ini termasuk para anak usia dini. Hal ini dituangkan dalam Pasal 28 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat. Sedang PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Ketentuan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pelayanan pendidikan anak usia dini di Indonesia saat ini baru mencapai 46,7% dari 28,4 juta anak usia dini. Pendidikan Anak Usia Dini non formal bahkan baru mencapai 29,3% (Dinas Pendidikan Nasional

Provinsi DIY, 2007). Pendidikan Anak Usia Dini di DIY saat ini berjumlah 1.489 lembaga yang terdiri atas 94 Taman Penitipan Anak (TPA), 413 Kelompok Bermain (KB) dan 982 Satuan Posyandu terintegrasi Sejenis (SPS). Sasaran utama Pendidikan Anak Usia Dini non formal diprioritaskan pada anak usia 2-4 tahun. Pencapaian Pendidikan Anak Usia Dini non formal di DIY tahun 2007 ditargetkan 45%, sehingga untuk merealisasikannya merupakan tantangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DIY.

Keberadaan pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jika dimanfaatkan dengan baik akan bisa menjadi pendukung program wajib belajar 12 tahun. Hal ini banyak ditunjukkan dengan pengalaman empirik berupa hasil penelitian bahwa para siswa yang berasal dari TK prestasinya lebih baik daripada yang tidak melalui TK sebelumnya. Namun kenyataannya belum banyak warga masyarakat yang berminat untuk memanfaatkan keberadaan PAUD. Yogyakarta sebagai kota pendidikan ternyata pada tahun 2007 masih menyisakan sekitar 15.000 anak yang belum merasakan pendidikan di Pos PAUD (Bernas, 22 Juli 2007).

Jika diperhatikan secara seksama Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu rangkaian pendidikan yang dapat digunakan untuk wahana pembentukan karakter anak di masa mendatang. Keberadaan PAUD diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan pendidikan kepada anak-anak sejak dini, terlebih orang tua. Bahkan dari sisi perkembangan anak sejak di dalam kandungan banyak para ahli mengemukakan bahwa pendidikan dilakukan semenjak anak dalam

kandungan. Meskipun betapa pentingnya pendidikan anak sejak dini, akan tetapi sebagian masyarakat belum menyadarinya. Hal ini mungkin karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.

Bertolak dari uraian di muka serta terbatasnya temuan empirik tentang Pendidikan Anak Usia Dini, padahal hal ini ternyata sangat penting untuk mempersiapkan anak di masa yang akan datang, maka perlu kiranya penelitian berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan. Penelitian menyangkut Pendidikan Anak Usia Dini dapat perihal pengorganisasiannya, pengelolaannya, pembelajarannya, pembiayaannya maupun kendala-kendalanya.

Sampai saat ini tantangan dunia pendidikan di Indonesia masih berat. Tantangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia, pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai.
2. Untuk mengantisipasi era global dunia, pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global.
3. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Permasalahan pendidikan yang masih sangat mendasar berkisar pada rendahnya kualitas hasil pendidikan. Berdasarkan hasil studi kemampuan membaca siswa SD yang dilaksanakan oleh *International Educational Achievement* (EIA) diketahui bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan 38 dari 39 negara sampel. Rendahnya kualitas hasil pendidikan juga berdampak terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Menurut laporan UNDP tentang *Human Development Index* (HDI) pada tahun 2002, Indonesia menempati peringkat 110 dari 173 negara yang diteliti, jauh di bawah negara ASEAN lainnya Singapura (25), Brunai Darussalam (32), Malaysia (59), Thailand (70), bahkan juga tertinggal dari Vietnam (109) dan Afrika Selatan (107) (Fasli Djalal, 2002:6-7).

Rendahnya kualitas pendidikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh *inputnya*, terutama calon siswa sebagai *row input*. Rendahnya kualitas calon siswa didasarkan pada suatu kenyataan bahwa selama ini perhatian kita terhadap pendidikan bagi anak usia dini masih sangat rendah. Belajar dari negara maju, konsep pembangunan sumber daya manusia (SDM) telah mereka lakukan sejak masa usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini diperlukan sebagai usaha untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap anak sebelum memasuki sekolah dasar.

Napitupulu (2002:32) menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini ditunjukkan saat diadakan pertemuan petinggi pendidikan sedunia dalam Forum Pendidikan Dunia tahun 2002 di Dakar, Sinegal. Pendidikan bagi anak

usia dini telah disepakati untuk diangkat sebagai salah satu program prioritas untuk setiap negara. Prawiradilaga dan Eveline (2004:347) mengemukakan bahwa pendidikan pada usia dini menjadi strategis manakala ia menjadi tolok ukur keberhasilan pada tahap selanjutnya. Betapa tidak, pada usia dini yaitu usia 0-8 tahun merupakan rentang usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses pendidikan yang akan mewarnai proses serta hasil pendidikan pada tahap selanjutnya. Pada usia tersebut merupakan periode kondusif untuk mengembangkan aspek-aspek fisiologis, kognitif, bahasa, komunikasi, sosial, emosional serta spiritual.

Pada rentang usia dini anak mengalami keemasan (*the golden year*), yang merupakan masa di mana anak mulai peka untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda-beda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulus yang datang dari lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar pertama untuk menggabungkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, bahasa, sosio-emosional dan spiritual. Untuk itu, sangatlah bijak apabila kita sebagai orang dewasa dapat memperlakukannya sebagai makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi untuk berkembang.

Mengutip pendapat J.A.Comenius dalam Soejono (2004:19) seorang ahli ilmu jiwa yang menekuni masalah pendidikan, mengatakan bahwa anak harus dipelajari bukan sebagai embrio orang dewasa melainkan dalam sosok alami anak agar kita dapat memahami kemampuan mereka dan mengetahui

bagaimana cara berhubungan dengan mereka. Kontroversi yang berlangsung selama ini tentang pembelajaran di PAUD adalah apakah anak-anak usia dini diberikan materi pelajaran, diajari membaca, menulis dan berhitung. Jerome Bruner dalam Supriyadi (2003:47) menyatakan bahwa setiap materi dapat diajarkan kepada setiap kelompok umur dengan cara-cara yang sesuai dengan perkembangannya. Kuncinya adalah pada permainan atau bermain karena sebagai media sekaligus substansi pendidikan itu sendiri. Dunia anak adalah dunia bermain dan belajar dilakukan dengan atau sambil bermain yang melibatkan semua indera anak.

Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini adalah Taman Kanak-kanak (TK) adalah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dalam jalur pendidikan formal dan merupakan pendidikan prasekolah. Partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan prasekolah di Indonesia masih relatif rendah, seperti terungkap dalam piramida pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 1999/2000 di mana dari 9,2 juta anak usia TK di Indonesia baru sekitar 1,5 juta anak saja yang mengikuti pendidikan di TK atau hanya sekitar 16,3% (Rosadi, 2002:49).

Menurut Rosadi (2002:49) dikatakan bahwa rendahnya angka partisipasi anak usia dini untuk mengikuti pendidikan di PAUD salah satunya dipengaruhi oleh terbatas dan tidak meratanya penyebaran PAUD di mana daerah perkotaan penyebarannya lebih pesat daripada di pedesaan. Guna menangkap gejala ini, Yayasan Pendidikan Nursiwi membentuk suatu wadah pendidikan dengan membuka kelas PAUD dengan nama PAUD Nursiwi.

Tujuan penyelenggaraan PAUD ini adalah untuk membekali dan menyiapkan mental anak lebih dini untuk dikenalkan pada dunia pendidikan agar memiliki kepekaan terhadap ilmu pengetahuan dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang beriman dan cerdas. Berdirinya PAUD Nursiwi ini pada mulanya kurang diminati oleh warga masyarakat namun pada waktu-waktu kemudian minat masyarakat tumbuh sadar untuk memanfaatkan keberadaan PAUD Nursiwi hingga sekarang menjadi PAUD teladan di kawasan kota Yogyakarta.

Kecuali karena gejala-gejala tersebut di atas, penulis tertarik lebih jauh untuk meneliti keberadaan PAUD Nursiwi yang terletak di Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, karena lembaga ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam menyiapkan para siswanya memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, baik secara mental maupun akademik.

B. Fokus Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan fokus penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta. Dari fokus penelitian tersebut, dapat dirinci sub fokusnya sebagai berikut.

- a. Bagaimana karakteristik guru pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta?

- b. Bagaimana karakteristik siswa pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta?
- c. Bagaimana karakteristik materi pembelajaran pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta?
- d. Bagaimana karakteristik interaksi pembelajaran pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta?
- e. Bagaimana karakteristik sistem evaluasi hasil pembelajaran pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta?
- f. Bagaimana karakteristik fisik lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mengarahkan kajian secara mendalam dan teliti karakteristik pembelajaran pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta dengan tujuan khusus ingin mendeskripsikan hal-hal berikut.

- a. Karakteristik guru pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta.
- b. Karakteristik siswa pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta.
- c. Karakteristik materi pembelajaran pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta.

- d. Karakteristik interaksi pembelajaran pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta.
- e. Karakteristik sistem evaluasi hasil pembelajaran pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta.
- f. Karakteristik fisik lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pengelola Pendidikan Anak Usia Dini, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran khususnya dalam pengelolaan pembelajaran pada anak usia dini.
- b. Hasil penelitian ini dapat pula sebagai referensi bagi peneliti lain khususnya penelitian yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di manapun berada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nursiwi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pengelolaan pembelajaran khususnya.

- b. Bagi orang tua/masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.